AL-Galam

VOLUME 26 NOMOR 2 NOVEMBER 2020

MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN MELALUI AGAMA PADA MASYARAKAT PERBATASAN DI SEBATIK TENGAH

Sabara

AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN BAGI NON MUSLIM: STUDI EMPIRIK KEBIJAKAN DAN MODEL PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO

Hadi Pajarianto dan Muhaemin

SIKAP DAN PERILAKU BERAGAMA ALUMNI PONDOK PESANTREN MADRASAH WATHONIYAH ISLAMIYAH (PPMWI) KEBARONGAN BANYUMAS

Supriyanto dan Hendri Purbo Waseso

DINAMIKA KALENDER HIJRIAH DALAM QANUN SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH

Ismail dan Bastiar

PEMBELAJARAN JARAK JAUH SEBAGAI HABITUS BARU DALAM EKOSISTEM PENDIDIKAN DI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Muhammad Rais

DINAMIKA KEBANGSAAN MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NUGINI DI MUARA TAMI JAYAPURA

Muh. Irfan Syuhudi

POTRET ORGANISASI TAREKAT DAN DINAMIKANYA DI SULAWESI BARAT

Mukhlis Latif dan Muh. Ilham Usman

AWA ITABA LA AWAI ASSANGOATTA: APLIKASI MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL TO WOTU

Muhammad Sadli Mustafa

THE BIOGRAPHY
OF PUANG MASSER AND HIS PAPERS

Idham

RELASI TAUHID DAN POLITIK PADA MASYARAKAT BONE

Abul Khair, A. Qadir Gassing, HT., Usman Jafar, dan Andi Aderus

KOMPARASI MODERASI KEBERAGAMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS TADULAKO DAN IAIN PALU

Nurhayati dan Suhardin

TULANG PUNGGUNG DIPUNGGUNGI: PECAH KONGSI NU-MASYUMI JELANG PEMILU 1955

Idwar Anwar

MENJAHIT BENANG MERAH NARASI SEJARAH ISLAM DOMPU

Ni Putu Eka Juliawati, Abu Muslim, Luh Suwita Utami

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM RITUAL MADDOJA BINE PADA KOMUNITAS MASYARAKAT BUGIS DI SULAWESI SELATAN

Sarifa Suhra dan Rosita

STRATEGI DI KOMUNITAS BARU: KECERDASAN BUDAYA KIAI MOJO MENDIRIKAN KAMPUNG JAWA TONDANO

Kamajaya Al-Katuuk

ANREGURUTTA HM. YUNUS MARTAN: SOSOK PANRITA PEMBAHARU

Husnul Fahimah Ilyas



KEMENTERIAN AGAMA RI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Jurnal A**L-Qalam**

VOLUME 26

NOMOR 2

Halaman 221 - 424 Makassar November 2020 ISSN 0854 - 1221 E-ISSN 2443 - 2288

TERAKREDITASI - SINTA 2

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset, dan Pengembangan Kemenristek Dikti RI Nomor 10/E/KPT/2019 Tanggal 4 April 2019



PERINGKAT AKREDITASI SINTA 2

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset, dan Pengembangan Kemenristek Dikti RI Nomor 10/E/KPT/2019 Tanggal 4 April 2019 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2019



BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR 2020

AL-Qalam

Volume 26 Nomor 2 November 2020

Jurnal Al-Qalam adalah jurnal yang diterbitkan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dengan tujuan menyebarluaskan informasi tentang perkembangan ilmiah keagamaan di Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia, meliputi; Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berasal dari hasil penelitian dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh Peneliti, Akademisi, maupun Pemerhati keagamaan. Terbit pertama kali tahun 1990 dengan frekuensi dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan November.

Penanggung Jawab:

Dr. H. Saprillah, S. Ag., M.Si.

Redaktur Ahli:

Prof. Dr. H. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

Pemimpin Redaksi:

Prof. Dr. H. Idham, M.Pd.

Sekretaris Redaksi:

Abu Muslim, SH.I., MH.I.

Anggota/Editor:

Dr. Muhammad Rais, M.Si.
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si.
Husnul Fahimah Ilyas, S.Pd., MA.Hum.
Baso Marannu, S.Pd., MM.
Muh. Irfan Syuhudi, S.Sos., M.Si.
Muh. Subair, SS, MA.
Asnandar Abubakar, ST.
Sitti Arafah, S.Ag., M.Pd.
Dra. Hj. Nelly, MM.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, MA.
(UNDIP Semarang).
Prof. Dr. H. Imam Tholhah, MA.
(Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI).
Prof. Dr. H. Koeswinarno
(Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI).
Prof. Dr. H. Marzani Anwar
(Balai Litbang Agama Jakarta)
Prof. Dr. Waseno
(Universitas Negeri Semarang)

Prof. Dr. Dwi Purwoko (LIPI).

Prof. Dr. Oman Fathurahman (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Nurman Said, Ph.D, MA

(UIN Alauddin Makassar).

Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D.

(Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI).

Dr. Hj. Ulfiani Rahman, Ph.D.

(UIN Alauddin Makassar).

Wahyuddin Halim, MA., Ph.D.

(UIN Alauddin Makassar)

Dr. Muhaimin, M.Th.I.

(UIN Alauddin Makassar)

Dr. Muhammad Yaumi, M. Ag.

(UIN Alauddin Makassar)

Kesekretariatan/Administrasi:

Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Amir Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S.Sos.
H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
Amru Ichwan Alwy, S.IPI.
Azruhyati Alwy, SS.
Nasri, S.Sos.
Zakiyah, SE

Lay Out & Cover Desain:

Fauzan Ariwibowo, SH.

Redaksi Jurnal Al-Qalam: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Alamat: Jl. AP. Pettarani No. 72 Makassar Telepon/Fax: (0411) 452952 – (0411) 452982

Email: alqalamjurnal@gmail.com

Website: http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam



Volume 26 Nomor 2 November 2020 Hal. 221 - 424

1.	MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN MELALUI AGAMA PADA MASYARAKAT PERBATASAN DI SEBATIK TENGAH	
	Sabara	221-236
2.	AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN BAGI NON MUSLIM: STUDI EMPIRIK KEBIJAKAN DAN MODEL PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO	
	Hadi Pajarianto dan Muhaemin	237-244
3.	SIKAP DAN PERILAKU BERAGAMA ALUMNI PONDOK PESANTREN MADRASAH WATHONIYAH ISLAMIYAH (PPMWI) KEBARONGAN BANYUMAS Supriyanto dan Hendri Purbo Waseso	245-254
		275-257
4.	DINAMIKA KALENDER HIJRIAH DALAM QANUN SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH Ismail dan Bastiar	255-266
5.	PEMBELAJARAN JARAK JAUH SEBAGAI HABITUS BARU DALAM EKOSISTEM PENDIDIKAN DI UIN ALAUDDIN MAKASSAR	
	Muhammad Rais.	267-280
6.	DINAMIKA KEBANGSAAN MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NUGINI DI MUARA TAMI JAYAPURA	
	Muh. Irfan Syuhudi	281-294
7.	POTRET ORGANISASI TAREKAT DAN DINAMIKANYA DI SULAWESI BARAT Mukhlis Latif dan Muh. Ilham Usman	295-306
8.	AWA ITABA LA AWAI ASSANGOATTA: APLIKASI MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL TO WOTU Muhammad Sadli Mustafa	307-318
9.	THE BIOGRAPHY OF PUANG MASSER AND HIS PAPERS	00, 010
٠.	Idham	319-326
10	. RELASI TAUHID DAN POLITIK PADA MASYARAKAT BONE	
10	Abul Khair, A. Qadir Gassing, HT., Usman Jafar, dan Andi Aderus	327-338
11	KOMPARASI MODERASI KEBERAGAMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS TADULAKO DAN IAIN PALU	
	Nurhayati dan Suhardin	339-352
12	TULANG PUNGGUNG DIPUNGGUNGI: PECAH KONGSI NU-MASYUMI JELANG PEMILU 1955	
	Idwar Anwar	353-368
13	. MENJAHIT BENANG MERAH NARASI SEJARAH ISLAM DOMPU	
	Ni Putu Eka Juliawati, Abu Muslim, Luh Suwita Utami	369-386
14	. NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM RITUAL MADDOJA BINE	
	PADA KOMUNITAS MASYARAKAT BUGIS DI SULAWESI SELATAN	
	Sarifa Suhra dan Rosita.	387-400
15	. STRATEGI DI KOMUNITAS BARU: KECERDASAN BUDAYA KIAI MOJO MENDIRIKAN KAMPUNG JAWA TONDANO	
	Kamajaya Al-Katuuk.	401-410
16	. ANREGURUTTA HM. YUNUS MARTAN: SOSOK PANRITA PEMBAHARU	
	Husnul Fahimah Ilvas	411-424



Volume 26 Nomor 2 November 2020 ISSN 0854-1221 / E-ISSN 2443-2288

PENGANTAR REDAKSI

Salam Kebajikan,

Puji Syukur Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Volume 26 Nomor 2 Tahun 2020 akhirnya kembali hadir di tengah-tengah para Pembaca Jurnal Al-Qalam yang budiman. Kehadiran 16 tulisan ini tentunya telah menjadi bagian dari komitmen kami untuk senantiasa menghadirkan tulisan-tulisan bermutu dengan senantiasa memerhatikan kedalaman substansial dalam kaitannya dengan topik-topik keberagamaan yang kontekstual dan peka zaman.

Meski Bangsa Indonesia di tahun 2020 ini masih dalam suasana Covid-19, namun bukan berarti hal tersebut menjadi halangan anak bangsa untuk menghasilkan karya-karya terbaru dan terbaiknya untuk mengisi tatanan kehidupan baru sebagai bagian dari nutrisi keilmuan, yang dalam konteks yang lebih luas dapat menjadi bagian dari penambah imunitas keilmuan kita semua.

Segmen yang kami hadirkan semoga dapat menjadi referensi ilmiah pada tahun pandemi ini. Kami juga menyadari bahwa dalam setiap sistem korespondensi dan proses sirkulasi Jurnal Al-Qalam Volume 26 Nomor 2 ini, tentu di sana-sini masih terdapat kekurangan, tapi kami mengedepankan prinsip pengabdian tanpa batas berbasis Ikhlas Beramal, Alhamdulillah semua tantangan dapat dilewati.

Ada ragam penyesuaian yang akhirnya dijalankan demi terbitnya edisi ini, tentu dengan senantiasa menjalankan dan mematuhi seluruh aspek protokol Covid-19. Olehnya itu, kami berharap bahwa tulisan yang kami sajikan ini bisa diterima dengan baik dan dapat turut andil dalam menambah khazanah keilmuan kita semua, khususnya di bidang kajian keagamaan.

Semoga Persembahan Tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Rahayu Rahayu Rahayu.*

Selamat membaca!

Makassar, 1 November 2020

Pemimpin Redaksi

TULANG PUNGGUNG DIPUNGGUNGI: PECAH KONGSI NU-MASYUMI JELANG PEMILU 1955

NEGLECTING THE BACKBONE: THE SPLIT OF NU-MASYUMI ALLIANCE PRIOR TO 1955 INDONESIAN GENERAL ELECTION

Idwar Anwar

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Kampus Tamalanrea Makassar Email: idwaranwar.ia@gmail.com

Naskah diterima 17 Juli 2020, Naskah direvisi 12 September 2020, Naskah disetujui 4 Oktober 2020

Abstrak

Pecah kongsi NU dan Masyumi jelang Pemilu 1955 memberi dampak besar bagi Masyumi, khususnya dalam memperebutkan suara umat Islam. Masyumi yang sebelumnya menjadi satusatunya partai Islam kemudian terpecah dengan keluarnya beberapa organisasi dan partai yang pernah dibubarkan Jepang dan menjelma menjadi partai politik. Kondisi ini diperparah lagi dalam tubuh Masyumi juga terjadi dualisme keanggotaan, sehingga dalam pandangan NU, Masyumi harus menghapus adanya dualisme keanggotaan yang terdiri dari anggota-anggota person dan anggotaanggota (yang berasal dari) organisasi (seperti NU, dll). Oleh karena itu, NU mengusulkan dua konsep untuk membenahi carut-marut keanggotaan Masyumi. Namun usulan tersebut dipandang remeh dan terkesan dinafikan oleh pimpinan pusat Masyumi. Kondisi inilah salah satunya yang memicu munculnya keinginan untuk berpisah dari Masyumi. Ibarat satu tubuh banyak jiwa. NU yang semula menjadi tulang punggung Masyumi kemudian dipunggungi. Berbagai konsepsi yang diusulkan NU mentah dan tak digubris mayoritas petinggi Masyumi. Tulisan ini akan menguraikan alasan dan bagaimana proses NU keluar dari Masyumi dan seperti apa capaian NU dan Masyumi dalam pemilu 1955. Meski sama-sama partai Islam (Dasar Ketuhanan), namun tidak sedikit momen NU dan Masyumi juga saling serang menjelang Pemilu 1955. Berdasarkan metode penelitian sejarah (heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi dan historiografi), konflik NU dan Masyumi, dengan spesifik diuraikan dalam tulisan ini, berdasarkan sumber-sumber primer yang ditemukan antara lain, Teks Putusan Muktamar NU ke -19 di Palembang dan Laporan Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Tulisan ini tetap berpijak pada corak dasar sejarah yang sifatnya memanjang dalam waktu (diakronis), namun juga memberikan nuansa lain, sehingga tulisan ini dapat mengembang dalam ruang (sinkronis).

Kata Kunci: pecah kongsi, nahdlatul ulama, masyumi, pemilu 1955

Abstract

The breaking up of NU and Masyumi before the election in 1995 had a huge effect on Masyumi, especially in fighting over the voices of Muslim. Masyumi, which was previously the only Islamic party, then fractured with the release of several organizations and parties that had been disbanded by Japan and transformed into a political party. The condition became worse when dualism appeared in Masyumi. NU requested Masyumi to solve the dualism issue of membership, either as a personal political member or personal with NU based member. Therefore NU proposed the two concepts to stabilize its membership. However, the concepts were underestimated by the central leadership of Masyumi. The situation was one of the trigger to separate from Masyumi. Like one body with many souls, NU which existed as the backbone abandoned eventually. The ideas that were proposed by NU were ignored by the majority of the high level of Masyumi leaders. This paper will describe why and how NU separated from Masyumi and the achievements of both NU and Masyumi in the election of 1955. Although both parties represented Islamic Parties (Religion Based), there are moments they attacked each other before the election of 1995. Therefore, with the historical research method (heuristic, criticism or verification, interpretation and historiography), the NU and Masyumi conflicts, specifically described in this paper, are based on primary sources found, among others, the Text of the Decision of the 19th NU Congress in Palembang and the Negotiation Report of Nahdlatul Ulama and Masyumi. This paper is still based on the basic features of history which are elongated in time (diachronic), but also provide other nuances, so that this paper can expand in space (synchronic).

Keywords: split, nahdlatul ulama, masyumi, election of 1955

PENDAHULUAN

osisi Sebagai negara yang baru saja merdeka, Indonesia telah mengambil keputusan yang sangat berani yakni dengan mengadakan Pemilihan Umum pada tahun 1955. Sepuluh tahun tentu bukanlah waktu yang cukup untuk membenahi berbagai bidang, utamanya kondisi keamanan yang masih belum sepenuhnya pulih, baik dari intervensi asing maupun dari dalam negeri sendiri. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan bangsa Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia masih belum memiliki pengalaman yang memadai untuk melaksanakan pemilihan umum nasional. Termasuk tentu saja infrastruktur, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Kendati demikian, sejak awal kemerdekaan, upaya bangsa Indonesia untuk berbagai membenahi infrastruktur pemerintahan untuk mewujudkan sebuah negara yang demokratis terus dilakukan, termasuk keinginan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan sekitar dua bulan setelah proklamasi, pemerintah membentuk Komite Nasional Pusat (KNP) atau biasa juga dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang untuk sementara berfungsi menjalankan kekuasaan legislatif DPR dan MPR.

Untuk mempercepat terwujudnya pemilu, Wakil Presiden Drs. Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden X tanggal 16 Oktober 1945 tentang Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada KNP. Berdasarkan isi maklumat ini sangat jelas terlihat keinginan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan Pemilu. Pada bulan November, sekitar satu bulan kemudian pemerintah mempertegas keinginan untuk menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946 dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang salah satunya berisi tentang anjuran pembentukan partai-partai politik (Kementerian Penerangan RI, 1951: xi).

Adanya anjuran pemerintah untuk segera melakukan pembentukan partai-partai politik didasari pemikiran dan harapan bahwa partai-partai politik itu nantinya akan dapat membantu memperkuat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.

Dalam maklumat itu ditegaskan pula bahwa pemerintah menyukai lahirnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham/ideologi yang ada di masyarakat dapat dipimpin/diarahkan ke jalan yang teratur. Oleh sebab itu, pemerintah berkeinginan agar partai-partai politik tersebut telah terbentuk sebelum dilangsungkan pemilihan anggota MPR dan DPR pada bulan Januari 1946.

Dalam rangka mendukung maklumat itu, pemerintah kemudian membentuk Kantor Pusat Pemilihan (KPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1946 tentang Pembentukan Kantor Pusat Pemilihan untuk Menjalankan Administrasi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1946 dan ditandatangani Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta.

Kendati demikian, Pemilu baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955 dimana pelaksanaan pemilu berbeda dengan Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik yang menyebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak Konstituante. Sedangkan Pemilu 1955 yang dilaksanakan sebanyak dua kali itu yakni pertama untuk memilih anggota-anggota DPR yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan pemilu kedua, yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggotaanggota Dewan Konstituante.

Sementara itu, sebelum masa kemerdekaan beberapa organisasi dan partai politik telah terbentuk, seperti De Indische Partij yang didirikan oleh tiga serangkai tokoh intelektual Indonesia, yakni E.F.E. Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo pada tanggal 25 Desember

1912. Berdiri pula Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1923 yang merupakan penerus dari organisasi Sarekat Dagang Islam (1911) yang didirikan Samanhoedi yang kemudian dibesarkan oleh H.O.S. Cokroaminoto. Organisasi ini kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (1912). Pada tahun 1929, PSI kembali berganti nama menjadi PSII dalam untuk lebih menegaskan upaya nasionalismenya (Mudanto Pamungkas, 2019: 7-8).

Selain itu, dalam pidatonya, D.N. Aidit menjelaskan kelahiran PKI didahului oleh berdirinya serikat buruh kereta-api yang bernama SS Bond dalam tahun 1905. Pada 1908 kemudian berdiri pula VSTP (Verenigingen van Spooren Tram Personeel), sebuah serikat buruh kereta api yang militan. Namun dalam perkembangannya, kemajuan kesadaran kelas buruh Indonesia sudah menghendaki organisasi yang tidak hanya membatasi diri pada perjuangan serikat buruh.

Bulan Mei 1914 di Semarang berdirilah *Indische Sociaal Dentocratische Vereeniging* (ISDV) yang didirikan oleh Henk Sneevliet. ISDV inilah yang pada tanggal 23 Mei 1920 melebur diri menjadi PKI. PKI adalah sintesis daripada gerakan buruh Indonesia dengan Marxisme-Leninisme dan dijiwai Revolusi Sosialis Oktober 1917 di Rusia (D.N. Aidil, 1955: 8-10).

Selanjutnya, berdiri pula Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juni 1927. Partai ini didirikan oleh para anggota "Bandung Studie Club" di bawah pimpinan Soekarno bersama Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo sebagai sekretaris. Terdapat pula tokoh terkemuka seperti, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Mr. Budiarto, Mr. Sartono, Mr. Ali Sastroamidjojo, Dr. Sasmi Sastrowidagdo dan Mr. Sunarjo (Moh. Oemar, dkk, 1994: 58-60).

Selain itu, berdiri pula organisasi keumatan, di antaranya Muhammadiyah (18 November 1912) di Yogyakarta didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad" yang menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian untuk menjelaskan jika pendukung organisasi Muhammadiyah adalah umat Muhammad, dan azasnya adalah

ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam (Suwarno, 2010: 66).

Dan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya didirikan pula Nahdlatul Ulama yang merupakan representasi ulama tradisional, dengan haluan ideologi ahlus sunnah waljamaah dengan tokoh-tokoh yang ikut berperan di antaranya, K.H. Hasyim Asy'ari (Masykur Hasyim, 2002: 66). Pada awal berdirinya NU bukan merupakan partai atau organisasi politik, melainkan sebuah iam'iyah diniyah atau organisasi sosial keagamaan. Namun, walaupun bukan organisasi politik, dimensi politik dalam aktifitas NU tidak kecil, terutama karena dalam tujuan pendiriannya sejak awal telah terkandung muatan politik, yaitu penggalangan nasionalisme di tengah iklim kolonial saat itu (M. Ali Haidar, 1994: 56).

Dalam perkembangannya kemudian, kedua organisasi keumatan/keagamaan yang disebut terakhir ini kemudian meleburkan diri ke dalam sebuah wadah kepartaian yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Saat berada di dalam satu wadah inilah, kemudian banyak gejolak politik yang terjadi, yang salah satunya menyebabkan NU harus keluar dari Masyumi dan kemudian mendirikan partai sendiri dengan nama Partai Nadhatul Ulama.

Perseteruan di tubuh Masyumi yang menyebabkan NU harus meninggalkan partai Islam terbesar di masa itu, melahirkan banyak spekulasi tentang adanya perebutan jabatan atau pengaruh, serta memunculkan berbagai pertanyaan, seperti apa dinamika yang terjadi di tubuh Masyumi? Apa sesungguhnya yang membuat NU harus meninggalkan Masyumi dan membuat partai sendiri? Bagaimana proses NU keluar dari Masyumi dan siapa tokoh yang getol dalam memperjuangkan NU keluar dari Masyumi? Beberapa pertanyaan inilah yang akan diuraikan di dalam tulisan ini. Dengan melacak dari berbagai sumber dan mengurai dinamika politik yang terjadi di dalam tubuh Masyumi, akan terlihat dengan jelas bagaimana sesungguhnya perseteruan NU, saat masih bergabung di dalam Partai Masyumi, hingga menjelang Pemilu 1955.

Sejarah pada dasarnya mempunyai kegunaan secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah itu berguna sebagai pengetahuan, sedangkan secara ekstrinsik vaitu kebermanfaatan di luar dirinya. Setidaknya ada empat guna sejarah secara intrinsik, yaitu (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (4) sejarah sebagai profesi. Secara umum sejarah mempunyai fungsi pendidik yaitu sebagai pendidikan (1) moral, (2) penalaran. (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa depan, (7) keindahan, dan (8) ilmu bantu. Selain sebagai pendidikan, sejarah juga berfungsi sebagai (9) latar belakang, (10) rujukan, dan (11) bukti (Kuntowijoyo, 2003: 15-28).

Tujuan dan manfaat penelitian ini yakni ingin mengurai latar belakang terjadinya perpecahan antara NU dan Masyumi yang berujung pada keluarnya NU dari barisan Masyumi dan bahkan NU mendirikan partai sendiri. Termasuk juga mengungkap proses NU keluar dari Masyumi dan siapa tokoh yang getol dalam memperjuangkan NU keluar dari Masyumi.

Sumber kajian dalam tulisan ini yakni berasal dari beberapa sumber primer, antara lain dokumen hasil rapat dan pidato yang terkait dengan kegelisahan NU terhadap keberadaannya Masyumi dan adanya keinginan NU untuk keluar dari Masyumi, serta. Buku-buku dan karya tulis lainnya. diperoleh Dokumen-dokumen ini dari beberapa sumber, khususnya bersumber dari perpustakaan PBNU. Dengan demikian, tulisan ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui perpecahan NU dan Masyumi yang bersumber dari naskah awal (primer), sehingga bisa melihat dan memahami dinamika politik partai Islam menjelang Pemilu 1955. Inilah salah satu yang membedakan tulisan ini dengan tulisan-tulisan lainnya.

Beberapa karya yang telah membahas permasalahan ini secara umum, baik yang ditulis oleh penulis Indonesia maupun penulis luar negeri di antaranya, buku yang ditulis M. Ali Haidar, A. Gaffar Karim dan Martin van Bruinessen.

M. Ali Haidar dalam bukunya "Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik" membahas konflik yang terjadi antara NU dan Masyumi. Dalam salah satu bab buku (Bab IV) ini membahas mengenai kehidupan politik NU.

Diungkapkan tentang hubungannya dengan Masyumi setelah NU keluar tahun 1952 dan mendirikan partai sendiri. Dalam bab ini dijelaskan, kendati NU terlibat bersama organisasi Islam lainnya dalam kongres umat Islam tahun 1946 untuk mendirikan partai Islam Masyumi, tetapi akibat perselisihan politik yang terjadi antara NU dengan kalangan Masyumi lainnya, NU menyatakan keluar dari partai itu dalam kongres NU tahun 1952. Diuraikan pula peranan NU setelah menjadi partai sendiri dalam percaturan politik nasional sampai sekitar tahun enam puluhan.

"Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia" yang ditulis A. Gaffar Karim tahun 1995, juga mengurai tentang keberadaan NU di Indonesia. Gaffar menyebutkan bahwa NU bagi sementara orang diidentikkan dengan istilah "tradisional", shalat dengan usalli, doa qunut, tarawih 23 rakaat, tawasul kepada para wali, dan seterusnya. Karena itu, barangkali masih sedikit yang memperhatikan bahwa di luar semua gambaran stereotip di atas, NU sebenarnya adalah salah satu denyut terpenting dalam totalitas kehidupan negeri ini. Gaffar mengungkapkan dengan keteguhannya (yang diimbangi dengan fleksibilitas) memegang apa yang dengan nada sedikit minor disebut sebagai "tradisionalisme", dan segala kekhasan dalam gaya berpolitiknya, NU telah banyak mewarnai bukan saja wacana keagamaan, tapi juga latar sosial-kemasyarakatan, bahkan politik dan ideologi bangsa.

Pada bab 2 dalam buku ini, Gaffar mengurai wajah NU dari tahun 1926-1984. Di dalam bab ini, Gaffar memaparkan proses terbentuknya NU dan bagaimana kemudian NU memasuki dunia politik yang selama ini hampir tidak tersentuh secara kelembagaan. Kendati dua dari empat tokoh pendiri MIAI (Madjelis Islam A'laa Indonesia) yang dibentuk pada 1937 adalah tokoh-tokoh NU, secara kelembagaan NU tidak terlibat. Keterlibatan keduanya hanya bersifat pribadi. MIAI yang dibentuk atas dasar keinginan untuk memperkuat tali persatuan umat Islam Indonesia ini kemudian mendapat sambutan secara kelembagaan NU setelah dua tahun kemudian. Asumsi Syafi'i Ma'arif, MIAI didirikan karena terdorong oleh contoh yang kompetitif dari golongan sekuler yang juga berusaha mempersatukan diri. Dalam

perkembangannya kemudian, kuatnya tuntutan untuk ikut dalam politik, akhirnya dibentuklah Masyumi (A. Gaffar Karim, 1995: 74).

Buku lain yang membahas mengenai NU dan perannya dalam perpolitikan di Indonesia berjudul "NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru" karya Martin van Bruinessen. Kendati buku ini terfokus pada perkembangan NU tahun 80-an, akan tetapi dalam beberapa bab ditemukan beberapa hal yang terkait dengan perpecahannya dengan Masyumi, terutama pada bab 2 yang mengurai masa "Empat Puluh Tahun Pertama Relasi Kuasa Di Masa Transisi Panjang".

Secara umum, Martin van Bruinessen (1994) dalam bukunya menguraikan dengan cukup terinci keterabaian NU dari pandangan disebut "modern". dunia yang Konsep "tradisional" pandangan dalam justru memberikan peluang besar bagi munculnya pandangan yang beragam. Ia menyesalkan betapa NU kerap hanya disebut secara sambil sebuah kajian lalu. ketika mestinya memberikan proporsi perhatian yang lebih pada NU.

disebutkan Beberapa karya yang sebelumnya memang membahas NU, namun secara umum, sejak berdirinya, hingga Partai NU dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan kebijakan fusi partai yang diterapkan pemerintahan Orde Baru pada 1973. Oleh karena itu, dengan metode penelitian sejarah (heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi dan historiografi), konflik NU dan Masyumi, dengan spesifik akan diuraikan dalam tulisan ini, berdasarkan sumber-sumber primer yang lain. ditemukan antara Teks Putusan Muktamar NU ke -19 di Palembang dan Laporan Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masyumi, serta ditambah sumber sekunder buku-buku dan karya tulis lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Secara lebih ringkas, setiap langkah ini berturut-turut biasa juga diistilahkan dengan heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Sebelum keempat langkah ini sebenarnya ada satu kegiatan penting, yang oleh Kuntowijoyo (1995: 98) ditambahkannya menjadi lima tahap penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik dan rencana penelitian.

Data merupakan unsur penting dalam melakukan penulisan sejarah. Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan, dalam arti sempit biasa disebut dokumen. Adapun dokumen dalam arti yang luas meliputi monumen, artefak, foto-foto, dan sebagainya. Data yang tercantum dalam bahan-bahan dokumenter itu pada dasarnya merupakan alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, terutama tentang permasalahan yang tidak dapat diobservasi lagi atau tidak dapat diingat lagi.

Dalam hal pengumpulan data, Louis (1983: 60-77) Gottschalk melakukan pengkategorian dokumen tertulis menjadi 8 jenis sebagai berikut: (1) Rekaman sejaman: instruksi, rekaman stenografis dan fonografis, surat-surat keluarga, dan buku-buku catatan dan memori pribadi, (2) Laporan konfidensial: berita resmi militer dan diplomatik, jurnal atau buku harian, dan surat-surat pribadi, (3) Laporan umum: surat-surat kabar, memoir dan otobiografi, sejarah resmi atau diotorisasi, (4) Questionnare tertulis tentang informasi dan opini, (5) Dokumen-dokumen pemerintah: laporan badan pemerintahan, undang-undang dan peraturan-peraturan, (6) Pernyataan Opini: tajuk rencana, esei, pidato, brosur, surat kepada redaksi, dan sebagainya, (7) Fiksi, nyanyian, dan puisi, (8) Cerita rakyat atau folklore, nama-nama tempat, dan pepatah atau peribahasa.

Hubungan antara konsep dan data dari dokumen-dokumen, digambarkan Sartono Kartodirjo (1993) bahwa data sosial secara konseptual bisa dilihat dari ciri-ciri setiap bentuk bahan dokumenter, seperti otobiografi, surat pribadi, catatan atau buku harian dan memoirs, surat kabar, dokumen pemerintah, atau cerita roman. Pendekatan dari berbagai macam teori-teori sosial atau pendekatan multidimensional memberikan model yang berbeda dalam perkembangan historiografi terutama bagi historiografi Indonesia. Sebab dengan pendekatan ilmuilmu sosial, ruang lingkup sejarah Indonesia tidak lagi dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang proses, tetapi juga mengenai struktur. Sejarah yang semula bersifat deskriptif dan diakronik mulai menuju ke arah tulisan yang analitis dan sinkronis.

Seperti dikemukakan di atas, metode yang digunakan dalam tulisan ini terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Paradigma sejarah yang digunakan adalah paradigma John Tosh, yakni melakukan rekonstruksi sejarah dengan memahami latar belakang, situasi dan kondisi sosial penyebab muncul dan berkembangnya sebuah peristiwa, serta arah perubahannya. Tulisan ini tetap berpijak pada corak dasar sejarah yang sifatnya memanjang dalam waktu (diakronis), namun juga memberikan nuansa lain sehingga tulisan dapat mengembang dalam ini ruang (sinkronis).

PEMBAHASAN

Lahirnya Kekuatan Politik Islam

Nahdlatul Ulama yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 merupakan salah satu kekuatan politik Islam yang menjadi representasi dari ulama "tradisional", dengan haluan ideologi ahlus sunnah waljamaah dengan tokoh-tokoh yang ikut berperan di antaranya K.H. Hasyim Asy'ari. Pada masa itu, ulama belum begitu terorganisir, namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Berbagai acara sering mereka lakukan. Misalnya, perayaan pesta seperti haul, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara (Masykur Hasyim, 2002: 66).

Pada awal berdirinya NU bukan merupakan partai atau organisasi politik. melainkan sebuah jam'iyah diniyah atau keagamaan. organisasi sosial Kendati demikian, dimensi politik dalam aktifitas NU tidak kecil, terutama karena dalam tujuan pendiriannya sejak awal telah terkandung muatan politik, yaitu penggalangan nasionalisme di tengah iklim kolonial saat itu. Hal ini bisa dilihat dari spirit warga NU dalam Piagam Nahdlatul Wathan yang berisi ungkapkan perjuang dan cinta tanah air yang sangat luar biasa: "Wahai bangsaku, cinta tanah air adalah bagian dari iman, cintailah tanah air ini wahai bangsaku. Jangan kalian

menjadi orang terjajah, sungguh kesempurnaan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Bukanlah kesempurnaan itu hanya berupa ucapan, jangan hanya pandai bicara. Dunia ini bukan tempat menetap, tetapi hanya tempat berlabuh. Berbuatlah sesuai dengan perintah-Nya. Kalian tidak tahu orang yang memutarbalikkan dan kalian tidak mengerti apa yang berubah di mana akhir perjalanan dan bagaimanapun akhir kejadian. Adakah mereka memberi minum juga pada ternakmu. Atau mereka membebaskan kamu dari beban, atau malah membiarkan tertimbun beban. Wahai bangsaku yang berpikir jernih dan halus perasaan kobarkan semangat dan jangan jadi pembosan" (Surabaya, 1916).

Bahkan setelah kemerdekaan, NU tidak pernah ketinggalan memberikan kontribusinya. Salah satunya terlihat dari dikeluarkannya resolusi NU yang dikeluarkan di Surabaya, tanggal 22 Oktober 1945 yang salah satunya menjadi pemicu dan pembakar semangat rakyat Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda pada 10 November 1945.

Dalam resolusi tentang Jihad fi Sabilillah tersebut disebutkan bahwa berdasarkan rapat besar wakil-wakil Daerah (Konsul 2) Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya, memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang dilakukan Belanda dan kaki tangannya yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia.

Oleh karena itu, NU meminta supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya Negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Resolusi ini dikeluarkan dengan mendengar berbagai pertimbangan dari tiap-tiap daerah di seluruh Jawa-Madura yang ternyata melihat sangat besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama untuk mempertahankan dan menegakkan agama, serta kedaulatan Negara Republik Indonesia merdeka.

Kalangan NU berpendirian bahwa mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk kewajiban bagi tiap-tiap umat Islam. Terlebih rakyat Indonesia sebagian besar terdiri umat Islam. Ditambah lagi para penjajah selama berkuasa banyak sekali kejahatan dan kekejaman yang dilakukannya dan tidak boleh dibiarkan kembali melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia dan agama yang mayoritas dihuni umat Islam.

Resolusi jihad ini sepertinya kurang mendapat perhatian dari kalangan sejarawan. Padahal dari sini kita dapat melihat seperti apa kekuatan yang ditimbulkan sebuah organisasi keislaman di awal kemerdekaan. Kata-kata yang termaktub di dalam resolusi tersebut mengandung energi yang luar biasa dalam menggerakkan kekuatan rakyat dalam melawan penjajah yang ingin bercokol kembali di Indonesia.

Pada tahun 1937 beberapa tokohtokoh Islam kemudian bersepakat mendirikan sebuah perkumpulan yang diharapkan mampu menaungi beberapa organisasi Islam yang diberi nama MIAI (Madjelis Islam A'laa Indonesia). Dalam lembaga ini NU mulai bergabung. Bergabungnya NU kedalam MIAI menandai mulai termanifestasinya orientasi organisasi di bidang politik. Di dalam MIAI, NU bersama GAPI (Gabungan Politik Indonesia) turut aktif menyuarakan tuntutan Indonesia berparlemen (M. Ali Haidar, 1994: hlm., 55-56).

Pada awalnya, NU tidak begitu bergairah mengikuti kongres Al-Islam. Tiga tiga kali kongres di Bogor, Surabaya, dan Malang tanpa keiikutsertaan NU. Kongreskongres itu sendiri tidak berjalan dengan baik, pertentangan paham juga masih terus berlangsung, khususnya antara SI dengan Persis dan Muhammadiyah.

Ketika Jepang menjajah, satu persatu dilakukan pembubaran partai politik Islam, di antaranya PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) dibubarkan pada 2 Mei 1942, dan PII (Partai Islam Indonesia) dibubarkan pada 20 Mei 1942. Dalam perjalanannya, Jepang ternyata menerapkan politik pecah belah yang berujung pada dibubarkannya MIAI pada 1943, lalu diubah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Sejarah pembentukan Masyumi tidak terlepas dari motif dan faktor yang melatarinya, seperti suasana revolusi dan persaingan berbagai kelompok ideologi di Indonesia pasca kemerdekaan, serta tokohtokoh yang mengambil inisiatif ikut serta

mewarnai pembentukan Masyumi. Masyumi didirikan dan diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam pada 7 November 1945 yang berdasarkan keputusan kongres umat Islam di Yogyakarta. Inisiatif pembentukan ini berasal dari tokoh partai politik dan gerakan keagamaan Islam sejak zaman sosial pergerakan, seperti Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Natsir, Ki Bagus Roem, Prawoto Mangkusasmito, Dr. Soekiman Wiriosandioio. Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Mawardi dan Dr. Abu Hanifah.

Masyumi yang dimaksud tidak lagi ada hubungannya dengan Masyumi yang didirikan pada zaman kekuasaan Jepang yang merupakan bagian dari politik Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia melalui ulama. Masyumi muncul sebagai kekuatan politik baru yang merangkul berbagai organisasi Islam, termasuk organisasi partai politik yang dulu dibubarkan Jepang, seperti PSII.

Oleh karena NU dipandang sebagai tulang punggung Masyumi, maka dipilihlah tokoh pendiri NU Hadratus Syeikh K.H. Hasyim Asy'ari menjadi Ketua Umum Majelis Syura (Dewan Partai) dengan dibantu Ki Bagus Hadikusuma (Muhammadiyah) sebagai Ketua Muda I, K.H. Wahid Hasyim (NU) dan Ketua Muda II Mr. Karsman Singodimedio (Muhammadiyah). Majelis Syura ini juga dibantu enam orang anggota yakni R.H.M. Adnan (Persatuan Penghulu dan Pegawainya, PPDP), H. Agus Salim (Penjadar), H.H. Abdul Wahab (NU), K.H. Sanusi (PUI), K.H. Abdul Halim (PUI) dan Syeikh Djamil Djambek (Majelis Tinggi, MIT). Sedangkan Pengurus Besar Masyumi diketua oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo (Partai Islam Indonesia, PII).

Sejak berdirinya, Masyumi terus melakukan pergerakan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Hal ini lebih dipermudah lagi karena Masyumi didukung oleh organisasi Islam besar, salah satunya Nahdlatul Ulama yang sangat mayoritas di tubuh Masyumi. Karena gerakan yang masif, pada 31 Desember 1950, Masyumi telah mencatatkan jumlah anggota kurang lebih 10 juta dengan 237 Cabang, 1.080 Anak Cabang dan 4.982 Ranting di seluruh Indonesia. Perkembangan yang pesat ini menjadikan

Masyumi partai Islam terbesar (Kementerian Penerangan RI, 1951: 14).

Besarnya pengaruh Masyumi di kalangan umat Islam membuat partai ini berkembang dengan sangat cepat. Terlebih dalam menghadapi pemilu yang telah direncanakan pemerintah di awal kemerdekaan dengan adanya Maklumat X Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik.

Tulang Punggung yang Dipunggungi

Awalnya, dalam kongres NU ke-16 di Purwokerto diserukan agar, "warga NU membanjiri partai politik Masyumi" dan diputuskan NU akan menjadi tulang punggung Masyumi (Greg Fealy, 2003: 53-54). Sebagai kekuatan umat Islam yang mulai tumbuh dan terus berkembang dengan baik, kekuatan NU tentu sangat diperhatikan oleh Masyumi. Dengan bergabungnya NU ke dalam Partai Masyumi, maka kondisi ini semakin membuka peluang NU untuk bergelut dalam politik praktis.

Munculnya keinginan yang sejak awal kemerdekaan menjadikan Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam ternyata tidak berlangsung lama, walau hingga Pemilu 1955. Keadaan organisasi yang tidak kondusif, tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan cepat pengaruh politik praktis merambah dan mencekoki pemikiran sebagian pengurus Masyumi, di antaranya distribusi kekuasaan yang kemudian menjadi ajang perebutan.

Keputusan PSII untuk kembali menjadi partai tahun 1947 setelah sebelumnya dibekukan Jepang dan NU keluar dari Masyumi tahun 1952, untuk sebagian juga dipengaruhi alasan-alasan ini. Selain, barangkali, adanya pertentangan lama ketika organisasi-organisasi Islam berselisih paham pada tahun 30-an yang muncul kembali (Martin Van Bruinessen, 2009: 55).

Berdirinya kembali PSII sebagai partai tahun 1947 menjadikan Masyumi terus diguncang prahara. Terlebih setelah NU juga keluar melalui keputusan Muktamar ke-19 di Palembang yang menyatakan keluar dari Masyumi membuat keberadaan partai sesungguhnya kian melemah.

Berbagai alasan konflik-konflik terjadi, sebagian dipengaruhi alasan-alasan komposisi

kepengurusan Masyumi, bentuk organisasi, dan ketidakefektifan struktur partai, khususnya

Dewan Syuro yang dianggap hanya pajangan. Persoalan lain yang mengemuka yakni kurangnya penghargaan atau respon yang baik terhadap peran kiai dan aspirasi pesantren, hingga semakin tersisih dari panggung politik. Bahkan ada pula yang menyebutkan pada persoalan pembagian jatah menteri yang dianggap tidak adil.

Termasuk juga berkembangnya sentimen Islam "modernis" dan Islam "tradisionalis" yang kian membesar. Para kiai NU merasa gerah dengan kondisi Masyumi yang sudah tidak bisa menjadi tumpuan aspirasi politik. Berunding berulang kali, mengirimkan delegasi berkali-kali. Akan tetapi hasilnya tidak memuaskan. Karena tidak ada kecocokan mengenai sturktur organisasi praktik demokrasi yang menurut keyakinan NU sangat merugikan perjuangan Islam dan umum, maka NU menyatakan keluar dari Partai Masyumi.

Sebagai partai yang merangkul semua kekuatan Islam, awalnya posisi ulama (kiai) mendapat tempat yang mulia, salah satunya dengan dibentuknya Majelis Syuro yang memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan partai dalam Masyumi. Namun menjelang tahun 1950-an, kondisi ini berubah melalui perubahan AD/ART Partai Masyumi tentang Dewan Syuro pada Muktamar IV Masyumi tanggal 15-19 Desember 1949, yang membatasi peran politik ulama dalam memberikan fatwa (Deliar Noer, 1987: 80-81).

Perubahan AD/ART ini membuat K.H. Wahab menentang keras hal tersebut. Namun penolakan itu ternyata tidak mendapat tanggapan baik dari pengurus Masyumi. Hal inilah yang semakin memperkeruh situasi di dalam Partai Masyumi. Belum lagi ditambah dengan adanya kecenderungan kalangan "modernis" di tubuh Masyumi yang seolah memandang remeh atau rendah keberadaan ulama yang notabene didominasi NU, membuat golongan "tradisionalis" merasa tersinggung dan melakukan penolakan. Konflik ini pun semakin memanas dan jurang di antara golongan modernis dan tradisional di tubuh Masyumi kian melebar (Saifullah Ma'shum, ed., 1999: 117).

Sejak kelompok Natsir yang mendominasi di Masyumi setelah menggantikan Dr. Soekiman yang selama ini dianggap dekat dengan kelompok NU, maka peran-peran ulama dalam Masyumi kian tergerus, salah satunya terlihat pada AD/ART yang dianggap melemahkan posisi ulama dalam mengambil keputusan politik, kecuali keputusan yang terkait erat dengan agama.

Dan sejak itu pula, jurang hubungan NU dan Masyumi kian melebar dan tak pernah lagi membaik. Melihat situasi itu, K.H. Wahab, selaku Pimpinan NU menggantikan K.H. Hasyim As'ari yang meninggal dunia, tidak bisa menerima. Sebagai politisi dan ulama, K.H. Wahab melihat kecenderungan peran NU dalam politik sudah tidak memberikan manfaat, terutama akibat konflik kepentingan yang belum bisa terselesaikan cenderung tidak menguntungkan. yang Padahal dalam pandangan K.H. Wahab, potensi UN sangat besar, terlebih jika untuk menjadi partai politik (Greg Fealy, 2003: 107-108).

Akibat kekisruhan itu, maka dalam Muktamar NU ke-18 tahun 1950 di Jakarta, K.H. Wahab yang terpilih menjadi Ra'is 'Am dalam pidato pertamanya, menegaskan sikap politiknya terhadap berbagai hal, khususnya mengenai banyaknya suara-suara miring yang menganggap rugi jika NU keluar dari Masyumi. Anggapan-anggapan itu menghembuskan keraguan pada diri orangorang NU akan kekuatan NU, sehingga mereka tidak memiliki keyakinan akan kekuatan besar yang dimiliki NU. Oleh karena itu, K.H. Wahab menegaskan:

"Banyak pemimpin-pemimpin NU di daerah-daerah dan juga di pusat yang tidak yakin akan kekuatan NU, mereka lebih menyakini kekuatan golongan lain. Orangorang itu terpengaruh bisikan orang lain yang menghembuskan propaganda agar NU tidak yakin akan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan NU itu ibarat senjata adalah meriam, betul-betul meriam. Tapi digoncangkan hati mereka oleh propaganda luar yang menghasut seolah-olah senjata itu bukan meriam, tetapi hanya... gelugu alias batang kepala sebagai meriam tiruan...! Pemimpin NU yang tolol itu tidak sadar akan siasat lawan dalam menjatuhkan NU melalui cara membuat NU

ragu-ragu akan kekuatannya sendiri." (Saifuddin Zuhri, 1987: 390).

Munculnya sikap politik internal yang menggugah itu, membuat aroma perseteruan menjalar hingga ke lapisan paling bawah warga NU. Meskipun demikian, nada ancaman yang tersirat dalam pidato K.H. Wahab terhadap keberadaannya di Masyumi makin tercium di kalangan petinggi Masyumi. Pertarungan hegemoni di tubuh Masyumi benar-benar terasa.

Pada tahun 1950-an itu pula, NU kemudian mengeluarkan maklumat untuk mengubah konsep Masyumi, dari model kesatuan menjadi federasi. Dalam Teks Putusan Muktamar NU ke-19 di Palembang, hal ini diungkapkan pada penjelasan tentang Konsepsi PBNU Mengenai Perundingan NU-Masyumi mengenai bentuk Masyumi dan usul Badan Federasi poin (1) yang mengatakan bahwa:

"Begitulah pula sebabnya, maka sejak tahun 1950, NU senantiasa mengusulkan agar bentuk Masyumi diubah menjadi federasi. Jadi sebenarnya soal ini bukanlah hal yang baru bagi NU, tetapi sudah merupakan soal lama." (PBNU, 1952: 2)

Walaupun demikian, respon positif yang diharapkan terhadap usulan NU tersebut tidak mendapat angin segar dari Masyumi. Dalam perkembangannya, NU kemudian membentuk Majelis Pertimbangan Politik (MPP) PBNU (Saifuddin Zuhri, 1987: 396) pada tanggal 3 September 1951 dengan tugas mengikuti perkembangan politik di tanah air, menganalisa dan menyimpulkannya untuk kemudian diserahkan kepada PBNU sebagai laporan. Dalam laporan ini juga termaktub di dalamnya saran dan usul yang seharusnya dijalankan NU dalam kerangka menghadapi berbagai kemungkinan politik yang akan terjadi.

Namun pada dasarnya, pembentukan MPP ini sepertinya memang telah dirancang untuk mempersiapkan segala kemungkinan perubahan politik yang akan terjadi. Terlebih dengan adanya Maklumat X Wakil Presiden 3 November 1945, membuat kemungkinan untuk membentuk partai politik dan berpartisipasi dalam Pemilu jauh lebih besar.

Peluang untuk muncul sebagai kekuatan politik baru di Indonesia sangat dimungkinkan bagi NU yang memiliki keanggotaan yang makin tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga tidak salah, jika diawal berdirinya Masyumi, NU benar-benar menjadi tulang punggung bagi berkembangnya Masyumi hingga ke seluruh Indonesia.

Sejak pidato K.H. Wahab pada Muktamar NU ke-18 tahun 1950 di Jakarta, konsolidasi ditubuh NU terus dilakukan. Peran-peran politik NU semakin dikelola dengan baik. Kendati peran-peran tokoh NU di Masyumi mulai tidak diperhitungkan, namun di sisi lain, kekuatan NU makin terkonsolidasi. Inilah yang membuat NU semakin berani dalam mengambil sikap terhadap Masyumi. Kendati dalam penerapannya, NU harus terus menjaga etika dalam berorganisasi. Hal ini bisa dilihat dari Putusan Muktamar NU ke-19 dan cara NU untuk keluar dari Masyumi, agar dilakukan dengan cara yang baik, dalam konteks etika berorganisasi, politik dan agama. NU sangat paham betul besarnya kekuatan warga NU, termasuk jika diaplikasikan dalam politik. Hal ini tentu akan menjadi penghalang bagi orang-orang dalam tubuh Masyumi, sehingga NU ingin disingkirkan secara perlahan-lahan.

Dalam kondisi demikian, NU masih tetap melakukan peran-peran politiknya di Masyumi, terutama keinginan untuk mewujudkan bentuk organisasi Masyumi, menjadi federal. Konsep ini menurut NU merupakan jalan yang terbaik untuk memecahkan persoalan dualisme keanggotaan yang menurut NU sangat mengganggu roda organisasi.

Hal ini bisa dilihat dari Konsepsi PBNU "Mengenai Bentuk dan Struktur Masyumi". Dalam pandangan NU, Masyumi harus menghapus dualisme di dalam organisasi Masyumi yang mempunyai dua macam keanggotaan, yakni anggota-anggota person dan anggota-anggota (yang berasal dari) organisasi (seperti NU, dan lain-lain). NU kemudian menawarkan jalan untuk menghapusnya yakni (salah satu dari dua):

- a. Mengubah organisasi Masyumi sekarang menjadi satu badan federasi yang hanya mempunyai anggota-anggota organisasi saja, sedang anggota-anggota person ditiadakan atau dijelmakan menjadi suatu partai politik lain yang namanya bukan Masyumi;
- b. Menetapkan organisasi Masyumi sekarang sebagai suatu partai yang beranggota person, tetapi anggota-anggota organisasi yang

sekarang tergabung di dalamnya harus dikeluarkan, kemudian dibentuk suatu badan federasi baru yang namanya bukan Masyumi (PBNU, 1952: 1).

Hal lain yang dikemukakan dalam Konsepsi PBNU terkait usulan Masyumi menjadi federasi yakni: Persoalan perbandingan suara didalam Masyumi (Badan Federasi), dengan mengadakan ketentuan mengenai perimbangan suara masing-masing anggota federasi menurut perimbangan jumlah anggota organisasi tersebut, dengan catatan organisasi besar jangan sampai memborong semua kekuasaan dalam federasi, tetapi jangan pula organisasi besar itu dianggap sama dengan organisasi kecil (yang iumlah sedikit); anggotanya Mengenai Dewan Pimpinan Tinggi Islam Indonesia, dengan menggalang persatuan umat Islam Indonesia yang lebih tinggi nilainya daripada sekarang untuk menyusun barisan (front) Islam yang teratur, mampu mengatasi dan memecahkan kesulitan yang dihadapi bersama; dan Cara Perjuangan Islam Parlementer yang prinsipildengan mengupayakan cara konsekuen perjuangan parlementer yang sungguhsungguh tidak sekedar memakai nama Islam, tetapi segan mempertahankan prinsip-prinsip keislaman. Sebab ternyata selama 5-6 tahun yang akhir sikap melepaskan prinsip Islam telah mematikan jiwa keislaman di dalam masyarakat (PBNU, 1952: 1-2).

Bahkan konsepsi yang ditandatangani Ketua Muda PBNU K.H. Wahid Hasyim itu juga mengeluarkan penjelasan terhadap konsepsi tersebut pada tanggal 18 Mei 1952 (13 Sya'ban 1371). Namun konsepsi yang kepada Masyumi ditawarkan tersebut ditanggapi dingin oleh Masyumi. Termasuk ketika NU mengirim utusan untuk melakukan dengan Masyumi, perundingan ditanggapi secara organisasi. Hal ini terungkap dari Laporan Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masyumi (LPNU-M), tanggal 9 Juni 1952 (16 Ramadhan 1371).

Keputusan untuk keluar dari Masyumi pada awalnya sesungguhnya sangatlah berat. Masih banyak di kalangan NU yang tidak begitu yakin dengan kekuatan yang dimiliki NU, terlebih jika NU juga akan menjadi partai politik, seperti yang diungkapkan K.H. Abdul Wahab Chasbullah pada Muktamar NU ke-18 tahun 1950 di Jakarta.

Akhirnya, dalam Muktamar NU ke-19 di Palembang, NU benar-benar menyatakan secara organisatoris, memutuskan keluar dari Masyumi dengan perbandingan suara 61 yang setuju, dan 9 menolak. Adapun sebanyak 7 suara abstain. Warga NU pun menyambut keputusan itu dengan lega, meski ada sebagian yang menolak dengan beberapa alasan. Hal ini tentu berbeda dengan sebagian kalangan Masyumi. Walaupun ada yang merasa prihatin dan mengupayakan agar keputusan itu tidak dilakukan, namun ada yang bersikap apriori terhadap langkah tersebut.

Dalam bukunya, K.H. Saifuddin Zuhri (1987: 398) mengungkapkan (meski tidak dijelaskan siapa tokoh yang dimaksud) ada seorang yang menduduki rangking kedua jajaran kepemimpinan Masyumi memberi keterangan pers menjelang muktamar, "tidak boleh tidak NU adalah golongan ekstrem kanan, dan kalau NU menguasai pemerintahan akan menuju kepada diktator". Pernyataan ini tentu saja membuat keadaan semakin tegang dan tidak menjernihkan, bahkan banyak menimbulkan antipati dari peserta muktamar (Saifuddin Zuhri, 1987: 138).

Meski demikian, NU masih tetap menjaga keadaan agar tetap kondusif. Dalam Teks Putusan Muktamar NU ke-19 itu disebutkan dua poin penting yakni a). Menyetujui utusan PBNU tanggal 5-6 April 1952, bahwa NU secara organisatoris memisahkan diri dari Masyumi, Masyumi mengusulkan pada agar mereorganisasi dirinya menjadi badan federatif. b). Menyetujui garis-garis besar yang dimajukan PBNU untuk melaksanakan putusan tadi yang terdiri dari tiga pokok:

Pertama, pelaksanaan putusan tersebut janganlah menimbulkan shock (keguncangan) di kalangan umat Islam Indonesia; Kedua, pelaksanaan putusan dilakukan dengan perundingan tersebut dengan Masyumi dan Ketiga, putusan ini dijalankan di dalam hubungan luas berkenaan keinginan membentuk Pimpinan Umat Islam Indonesia yang nilainya lebih tinggi, di mana partai-partai dan organisasi-organisasi Islam, baik yang sudah maupun yang belum tergabung di dalam Masyumi dapat berkumpul dan berjuang bersama-sama.

Dari putusan ini nampak jelas bagaimana sikap dan etika berpolitik (organisasi) NU yang masih mempertimbangkan berbagai hal, meski telah mengambil keputusan untuk keluar dari Masyumi. Sikap dan etika politik ini tentu NU menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, kendati NU belum menjadi sebuah partai politik.

Dalam Laporan Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masvumi iuga diungkapkan, untuk menindaklanjuti keputusannya, **PBNU** dalam muktamar kemudian membentuk sebuah tim sebagai delegasi mewakili **PBNU** melakukan perundingan dengan Masyumi. Delegasi ini beranggotakan 7 orang yang diambil dari PBNU sebanyak 2 orang yakni Zainul Arifin (sebagai Ketua) dan Wahab Chasbullah (PBNU). Sedangkan 5 orang lainnya diambil dari cabang yakni Amin Iskandar (Cabang Bandung), O. Hulaimi (Cabang Tasikmalaya), Zainal Muttagiem (Cabang Cirebon), Husin Saleh (Cabang Jakarta Raya), dan Djunaidi Saleh (Cabang Menes).

Adapun ketentuan dalam mandat yang diberikan kepada delegasi berdasarkan rapat bersama PBNU bersama delegasi pada tanggal 21-22 April dan 2 Mei 1952 menyebutkan pembatasan terhadap tugas delegasi yang menyampaikan Keputusan hanya hasil Muktamar NU ke-19 di Palembang. Pembatasan ini juga diberikan dalam soal siapa yang harus berbicara dan bagaimana aturan pembicaraan dari setiap delegasi NU.

Delegasi NU juga hanya membicarakan bagaimana cara (pelaksanaan) NU keluar dari Masyumi, sebab keputusan sudah diambil muktamar dalam merupakan keputusan tertinggi dalam organisasi NU dan tidak bisa diubah lagi. Sedangkan masa untuk proses keluarnya NU dari Masyumi dibatasi dalam waktu tiga bulan, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya putusan sampai akhir Juli 1952.

Hal lain yang harus pembicaraan delegasi adalah menanyakan dengan resmi pada DPP Masyumi tentang siapa-siapa yang berhak menerima (melaksanakan) perundingan dari pihak Masyumi, apakah DPP atau Presidium Muktamar Masyumi. Hal ini penting bagi NU, sebab dapat menjadi pegangan resmi. Terlebih dalam pandangan NU, di dalam tubuh Masyumi sendiri terjadi perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Sementara di pihak Masyumi sepertinya tidak memandang perlu membentuk tim perunding, sebab keputusan NU itu merupakan keputusan muktamar. Oleh sebab itu, Masyumi hanya menyelenggarakan rapat pengurus DPP untuk menerima delegasi perunding NU yang dihadiri Prawoto Mangkusasmito (Pimpinan Rapat). Mr. Mohammad Roem. Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. Burhanuddin Harahap, Mr. Kasman Singodimedjo, Moh. Sardjan, Faqih Usman, Z.A. Ahmad, Isa Anshari, Ny. Sunarjo Mangunpuspito, Wali Alfatah, A. Harjono, Taufigurrahman, dan Sjarif Usman.

Berdasarkan laporan delegasi NU, pihak Masyumi tidak menentukan siapa yang menjadi juru bicara. Akibatnya, masingmasing anggota DPP Masyumi yang hadir dapat mengemukakan pendapatnya. Bagi delegasi NU, pertemuan ini laiknya sidang organisasi Masyumi dan bukan pertemuan antar delegasi. Sehingga tidak nampak adanya pendirian organisasi yang dapat dijadikan pegangan dalam perundingan. Bahkan dalam laporannya, delegasi NU menyebutkan bahwa di antara pengurus DPP Masyumi sendiri perdebatan, baik antara Ketua Pertemuan (Prawoto) dengan peserta dari DPP Masyumi, maupun antara anggota DPP Masyumi sendiri.

Nampak keengganan DPP Masyumi menyambut ajakan PBNU untuk sama-sama membentuk delegasi perundingan. Akibatnya, pertemuan delegasi NU dengan DPP Masyumi dirasakan seperti sidang pengadilan untuk memeriksa seseorang (segolongan orang) sebagai pesakitan. Pertemuan tanggal 22 Mei 1952 itu tak membuahkan hasil. Terlebih beberapa orang dari DPP Masyumi dalam pertemuan itu sudah berkeinginan untuk menghentikan dan membatalkan pertemuan dengan NU.

Meski demikian, NU tetap menjaga etika dalam berorganisasi dan tetap mengikuti langkah-langkah organisasi dalam proses keluarnya NU dari barisan Masyumi. Banyak orang Masyumi yang menganggap keputusan NU keluar dari Masyumi hanya karena dorongan emosional, kurang menjaga persatuan Islam, sekurang-kurangnya di antara

sesama anggota Masyumi. Walaupun demikian, NU tetap memperlihatkan keteguhan prinsipnya dalam menjunjung tinggi hasil muktamar dengan tetap menjaga hubungan dan etika dalam berorganisasi.

Delegasi yang dibentuk untuk menjembatani proses keluarnya NU dari Masyumi menunjukkan cara berpikir dan berpolitik NU sangat modern. Jauh berbeda dengan anggapan yang selama ini ada bahwa NU dianggap kelompok tradisional atau kelompok sarangan yang hanya mengenal "kitab kuning" dan tidak paham cara berpolitik.

Anggapan-anggapan seperti itu sirna ketika melihat bagaimana sepak terjang NU dalam politik, khususnya pasca kemerdekaan, hingga Pemilu 1955. Tokoh-tokoh NU sangat berperang penting dalam proses terbentuk, berdiri dan tegaknya bangsa Indonesia. Kaum santri yang dianggap golongan tradisional ini mampu memainkan peran dalam percaturan politik. Langkah-langkah yang diambil tegas, terukur, dan tetap berlandaskan pada ajaran-ajaran agama Islam.

Oleh sebab itu, dalam proses keluar dari Masyumi, NU tetap bermain dengan tenang. Langkah-langkah politik yang diambil sudah diperhitungkan dengan matang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta rapat (Masyumi) kepada delegasi NU, antara lain apa landasan agama, politik, psikologis, dan siasat NU keluar dari Masyumi, tetap dijawab melalui prosedur keorganisasian.

Dalam rapat DPP Masyumi 22-23 Mei 1952 malam harinya misalnya, delegasi NU menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat pertanyaan-pertanyaan meniawab vang diajukan dalam rapat pagi hari secara lisan untuk mencegah timbulnya interpretasi yang berbeda-beda dan jangan sampai semangat meluap-luap akan mempengaruhi pembicaraan. Hal ini tentu sangat mungkin terjadi, mengingat banyaknya provokasi yang mewarnai proses keluarnya NU dari Masyumi. Dan kondisi itu akan dapat membuat peserta perundingan menjadi sangat emosional meluap-luap) (semangat dan bisa memunculnya perdebatan keras.

Setelah penundaan pertemuan dan rencana akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya dengan jawaban tertulis delegasi NU, ternyata hal itu belum juga dilakukan.

Setelah lewat satu minggu belum juga ada informasi mengenai kelanjutan pertemuan (termasuk secara tertulis), maka pada tanggal 31 Mei 1952, PBNU menyampaikan surat kepada DPP Masyumi mengharap agar segera dilakukan pertemuan (tukar menukar pendapat secara tertulis). Bahkan dalam isi surat, NU menyampaikan Konsepsi mengenai hubungan NU-Masyumi yang sedianya akan disampaikan secara resmi dalam suatu pertemuan antar delegasi untuk tukar menukar dokumen. Namun dalam laporan delegasi NU mengungkapkan bahwa sampai laporan itu ditulis tanggal 9 Juni 1952, DPP Masyumi belum juga memberikan balasan.

Maka dari itu, untuk mengamankan posisi orang-orang NU yang berada di dalam kabinet, sebagai pegangan, NU telah mengirim surat tanggal 7 Mei 1952 kepada DPP Masyumi. Surat itu menyatakan bahwa sampai belum ada ketentuan lebih jauh dari keputusan pertemuan NU dan Masyumi, maka orangorang NU dalam Fraksi Masyumi di DPR Pusat, tetap dipertahankan.

Keluarnya NU dari barisan Masyumi merupakan sebuah proses yang sangat demokratis. NU mampu memainkan ritme politik dengan sangat baik. Tegas dan konsisten pada pendirian organisasi menjadikan NU tetap elegan di mata masyarakat, khususnya warga NU di seluruh Indonesia. Dengan sikap politik yang tampak sangat matang dalam berpolitik, tentu akan menambah besar kepercayaan diri NU.

Adanya anggapan bahwa keluarnya NU dari Masyumi akan memecah-belah umat Islam sesungguhnya tidaklah terbukti. Bahkan konsepsi NU tentang bentuk federasi bagi Masyumi merupakan upaya mencari payung yang besar bagi tempat berteduhnya berbagai partai dan golongan Islam. Setelah keluar dari Masyumi, NU pun membuktikan dengan membentuk Liga Muslimin Indonesia bersama PSII dan Perti pada tanggal 30 Agustus 1952. Selain ketiga partai itu, Dar al-Da'wah wal-Irsyad dari Parepare Sulawesi Selatan dan Persyarikatan Tionghoa Islam Indonesia yang berpusat di Makassar juga ikut bergabung.

Pemilu 1955 NU Unjuk Kekuatan

Tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia setelah 10 tahun merdeka. Meski sejak Maklumat X Wakil Presiden dikeluarkan yang salah satu isinya akan melaksanakan Pemilu pada Januari 1946, namun nyatanya pemilu baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955.

NU yang baru saja terjun ke politik praktis dengan membawa bendera sendiri tentu merupakan tantangan tersendiri. Walau selama ini telah melalui proses politik praktis bersama Masyumi, namun tentu sangat berbeda ketika membawa bendera sendiri. NU yang selama ini merupakan organisasi keumatan, harus terjun ke politik praktis yang pasti atmosfernya berbeda dengan maksud awal kelahiran NU.

Bukan hanya tantangan secara internal yang harus dihadapi NU, seperti melakukan pembenahan struktur dalam konteks kepartaian, tetapi secara eksternal, NU juga harus berhadap-hadapan langsung dengan puluhan partai yang telah muncul dan telah siap dalam bertarung pada Pemilu 1955. Tidak cuma bertarung dengan partai dengan Dasar Kebangsaan dan Marxisme, tetapi NU juga harus bertarung dengan sesama partai yang dengan Dasar Ketuhanan (Keagamaan), khususnya Islam.

Kendala lain yang harus dihadapi yakni waktu pelaksanaan pemilu yang sudah sangat dekat. Jika partai lain, khususnya partai-partai besar yang sudah terbentuk sejak lama berdiri sebagai partai politik mempunyai waktu yang cukup, maka NU hanya mempunyai waktu kurang lebih tiga tahun untuk mensosialisasikan diri sebagai partai politik kepada rakyat.

Dengan kematangan dalam menjalankan organisasi, NU ternyata mampu meraih prestasi gemilang dalam Pemilu 1955 dengan masuk 4 besar partai peraih suara terbanyak. Prestasi yang dicapai NU itu mencengangkan banyak pihak, termasuk di kalangan NU sendiri. Dari sebelumnya hanya mendapatkan jatah delapan kursi parlemen, NU berhasil mencapai prestasi sebagai posisi ketiga dengan 18,4 % suara untuk DPR (45 kursi) dan 18,47 % suara untuk Konstituante (91 kursi).

Adapun PNI sebagai pemenang pertama pada Pemilu 1955 meraih suara 22,3 % untuk pemilihan anggota DPR (57 kursi) dan 23,97 % suara untuk pemilihan Konstituante (119 kursi). Di posisi kedua diraih Masyumi dengan 20,9 % suara di DPR

(57 kursi) dan 20,59 % suara untuk Konstituante (112 kursi). NU dengan 18,4 % suara untuk DPR (45 kursi) dan 18,47 % suara untuk Konstituante (91 kursi) menempati posisi ketiga. Sedangkan PKI berada pada urutan keempat dengan perolehan suara 16,4 % untuk DPR (39 kursi) dan 16,47 suara untuk Konstituante dengan mendapatkan 80 kursi (Herbert Feith, 1957: 58).

Keberhasilan yang diraih NU merupakan buah dari keria keras yang luar biasa, utamanya dalam mengkonsolidasikan dengan cepat kekuatan NU di basis-basis massa NU yang kemungkinan masih belum paham betul langkah politik yang dilakukan PBNU untuk masuk dalam pertarungan politik praktis melalui pemilu dengan membawa bendera sendiri. Terlebih pertarungan keras yang terjadi, termasuk di antara partai Islam tentu menjadi ancaman tersendiri bagi NU dalam masa kampanye. Partai-partai saling menghujat, bukan saja pada program yang mereka tawarkan ke masyarakat, namun lambang partai pun menjadi bahan hujatan di antara partai-partai.

Seperti halnya yang dilakukan Masyumi yang tidak hanya menyerang musuh bebuyutannya, PKI, tapi juga menyerang partai Islam lain, NU dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Dalam catatannya, Feith menyebutkan, "Masing-masing dengan lambang yang mengandung huruf Arab, menjadi bulan-bulanan serangan kampanye Masyumi yang mengatakan huruf Arab itu suci dan menusuknya berarti menodainya" (Herbert Feith, 1957: 18).

Oleh karena itu, kerja keras tokohtokoh, jajaran pengurus dan semua warga NU untuk meyakinkan rakyat agar mau memilih NU sebagai partai yang dapat menyalurkan aspirasi mereka tentu merupakan tugas yang sangat berat. Namun usaha yang dilakukan dalam waktu yang cukup singkat itu ternyata membuahkan hasil yang gemilang.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam keberhasilan NU menjadi partai 4 besar pemenang pemilu yakni kemampuan NU menggalang solidaritas di lingkungan kaum santri dan ulama dengan memperjelas perjuangan mereka untuk memenangkan ideologi Islam dan sekaligus menunjukkan sikap anti komunis. Berbagai pengajian yang dilakukan secara berkala yang membuat

hubungan kiai dengan santri kian erat, menjadikan kemudahan tersendiri dalam mengkonsolidasinya secara efektif tatkala masa kampanye berlangsung.

Hal lain yang memberi pengaruh atas capaian suara NU yakni tema-tema kampanye yang dibawakan NU selalu bertolak dari tradisi keagamaan yang umumnya menyajikan pandangan keagamaan yang cukup lentur dengan orientasi kepada pembinaan iman dan akhlak. Kampanye NU juga kerap kali disertai lelucon dan sindiran yang kocak layaknya sebuah grup ketoprak. Ada pula irama lagulagu yang digubah dari bahasa Jawa yang membuat masyarakat merasa dekat dengan NU.

Strategi kampanye lainnya yang dilakukan yakni melalui buku yang diterbitkan berisi syair-syair Arab maupun Jawa (huruf pegon). Isi syair itu bermacam-macam mulai dari soal bimbingan keagamaan dan iman, akhlak juga tuntunan praktis pemilihan umum dan pemungutan suara serta petunjuk mencoblos tanda gambar NU dalam pemilihan umum (M. Ali Haidar, 1994: 182).

Berdasarkan beberapa realitas selama kampanye, dapat dilihat sesungguhnya paling tidak ada tiga pilar utama yang menyangga kekuatan NU, sehingga dapat meraih suara yang signifikan pada Pemilu 1955 yaitu ulama, pesantren, dan politisi. Kekuatan ini ternyata benar-benar mampu bersinergi membangun kekuatan bersama rakyat. Dalam waktu hanya sekitar 3 tahun sebelum menghadapi Pemilu 1955, ternyata NU mampu mengkonsolidasikan dan membuktikan kekuatannya.

PENUTUP

Terjadinya perpecahan di tubuh Masyumi jelang Pemilu 1955 ternyata memberi dampak negatif dalam memperebutkan suara umat Islam. Berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilu 1955, tampak jelas kemenangan luar biasa akan diraih Masyumi seandainya partaipartai yang dulunya bersama Masyumi masih tetap dalam satu gerbong pada Pemilu 1955.

Lain halnya dengan NU yang juga ikut bertarung dalam Pemilu 1955, di luar dugaan ternyata mampu meraih suara signifikan dan berada di posisi ketiga raihan suara, baik di DPR maupun Konstituante. Karena itu, keluarnya NU membawa berkah tersendiri, khususnya terhadap terkonsolidasinya kekuatan NU yang selama ini tidak begitu disadari.

Pidato K.H. Wahab Chasbullah dalam Muktamar NU ke-18 tahun 1950 di Jakarta. perlahan-lahan menyadarkan NU akan besarnya kekuatan yang mereka miliki. Banyaknya suara-suara miring yang menganggap rugi jika NU keluar dari Masyumi, ternyata tidak terbukti. Anggapananggapan yang menghembuskan keraguan pada diri orang-orang NU akan kekuatan besar NU (sehingga mereka tidak yakin akan kekuatan yang dimiliki NU), dihancurkan oleh kenyataan perolehan suara yang dicapai NU pada Pemilu 1955.

Maka tidaklah salah, jika K.H. Wahab Chasbullah menegaskan bahwa kekuatan NU, jika diibaratkan senjata, adalah meriam. Bukan batang kelapa atau meriam tiruan seperti yang dihembuskan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan NU, dengan cara membuat NU ragu-ragu akan kekuatannya sendiri. Dan K.H. Wahab telah membuktikan ucapannya di Pemilu 1955.

Namun yang perlu menjadi catatan penting dalam tulisan ini, khususnya dalam proses keluarnya NU dari Masyumi, bahwa NU mampu melalui proses pemisahan tersebut dengan cara yang sangat baik dan elegan. keluarnya NU dari Masyumi merupakan proses yang sangat demokratis dan berlandas pada etika politik yang Islami. NU tetap menjaga etika organisasi dan prosesproses dalam berorganisasi. Kenyataan ini menjadi salah satu bukti kedewasaan NU (tokoh-tokoh) dalam berpolitik. Kendati perlakuan tersinggung dengan Masyumi, utamanya dengan dihilangkannya peran kiai dalam mengambil keputusan politik, tetapi NU tetap menghormati prosedur organisasi Masyumi.

Tegas dan konsisten pada pendirian organisasi, menjadikan NU tetap elegan di mata rakyat, khususnya seluruh warga NU. Dengan sikap yang nampak sangat matang dalam berpolitik pada masa itu, telah menambah besar kepercayaan diri NU yang mampu dibuktikannya dengan perolehan suara yang signifikan pada Pemilu 1955.

Tentu saja sangat diharapkan NU yang ada sekarang, mampu lebih baik dari pendahulu-pendahulunya. Kejayaan masa lalu bukan hanya menjadi cerita nostalgia yang indah atau menjadi catatan usang yang tersimpan di lemari-lemari buku, tetapi harus terus dijaga dan diperjuangkan demi kejayaan NU, agama, rakyat dan bangsa Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah atas karunia Tuhan Maha Kuasa, Tulisan ini dapat yang diselesaikan dan dipublikasikan. Bersama ini pula penulis mengaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan semua kontribusi dalam penyelesaian tulisan ini. Secara khusus dihantarkan kepada Pengelola Perpustakaan **PBNU** atas supporting kepustakaan sebagai referensi utama dalam tulisan ini. Juga kepada redaksi Jurnal Al-Qalam serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Jazakallah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Alawi, *NU Keluar dari Masyumi dengan Cara Paling Demokratis* dalam https://www.nu.or.id, diakses tanggal 20 April 2020.
- Aceh, Abu Bakar. 2015. *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim.* Jombang: Pustaka Tebuireng.
- Aidil, D.N.. 1955. *Lahirnja PKI dan Perkembanganja*. Djakarta: Jajasan "Pembaruan".
- Bruinessen, Martin van. 1994. NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta: LKiS.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Duverger, Maurice. 2000. Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Press
- Fealy, Greg. 2003. *Ijtihat Politik Ulama:* Sejarah NU 1952-1967. Yogjakarta: LKIS.
- Feith, Herbert. 1957. *Indonesian Election* 1955. New York: Cornell University Press.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Indonesia University Press.

- Haidar , M. Ali. 1994. Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasyim, Masykur. 2002. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95.
- Junedding, Burhaman. 2019. 'Perjuangan Tanpa Revolusi: Perspektif Baru dalam Memahami Kekerasan Periode Revolusi di Indonesia Timur'. 'Al-Qalam', Vol. 23/3.
- Karim, A. Gaffar. 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-LKIS.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kattsoff, O. L. 1986. *Pengantar FIlsafat*. Alih Bahasa Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. 1951. *Kepartaian di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- K.H.air, Fathul Karimul .2019. 'Wajah Agama Di Hadapan Politik Identitas: Refleksi-Kritis Sejarah Di/Tii Di Sulawesi Tenggara'. 'Al-Qalam', Vol. 23/3.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ma'shum, Saifullah, ed.. 1999. K.H. Abdul Wahab Chasbullah: Perintis, Pendiri dan Penggerak NU. Jakarta: Panitia Penulisan Buku Sejarah Perjuangan K.H. Abdul Wahab Chasbullah.
- MIAI dan Deretan Ormas Islam yang Berjuang Mendirikan Indonesia dalam https://republika.co.id, diakses tanggal 20 April 2020.
- Miswanto, Agus. 2012. Sejarah Islam dan Kemuhammadiyaan. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang [P3SI UMM].

- Noer, Deliar. 1965. *Pengantar ke Pemikiran Politik I.* Medan: Dwipa.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Oemar, Moh., dkk. 1994. *Sejarah Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Depdikbud.
- Pamungkas, Mudanto. 2019. *Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Parlaungan. 1956. *Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen*. Jakarta: CV. Gita.
- PBNU (Bagian Da'wah). 1954. "28 Tahun Partai NU Telah Berjuang", dalam Risalah Kenang-kenangan ke 28 Partai NU (Kudus: Panitia Hari Ulang Tahun ke-28 Partai NU).
- PBNU. 1952. *Teks Putusan Muktamar NU ke* -19 di Palembang. Jakarta: PBNU.
- PBNU. 1952. Laporan Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masyumi, tanggal 9 Juni 1952 (16 Ramadhan 1371). Jakarta: PBNU.
- Saifuddin, Lukman Hakim, dkk. 2013. Riwayat Hidup dan Perjuangan, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Ulama Pejuang Kemerdekaan. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri.
- Sejarah Singkat Muhammadiyah dalam http://m.muhammadiyah.or.id/, diakses tanggal 20 April 2020.
- Suwarno. 2010. Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara (Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Hasan. 1986. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN.
- Zuhri, Saifuddin Zuhri. 1983. Secercah Dakwah. Jakarta: PT. Alma'arif.
- Zuhri, Saifuddin Zuhri. 1987. *Berangkat dari Pesantren*. Jakarta: Gunung Agung.